

Kontribusi Majelis Pendidikan dalam Meningkatkan Standar Pendidikan: Tinjauan Strategi dan Implementasi di Sekolah

Ahyar Rasyidi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin

ahyarrasyidi@staialjami.ac.id

Abstract

This research aims to describe the role of the Education Council in improving educational standards. This research aims to determine the extent to which the role of the Education Council is facing the main challenges in education. The main educational challenge is creating a quality and equitable education system, which is often faced with problems of gaps between policy and implementation, limited resources, and ineffective supervision. Education councils play an important role in setting policies, monitoring implementation, and evaluating educational outcomes to address these problems. This research uses library research methods by analyzing various literature related to the role of educational councils in improving educational standards. The research results show that the Education Council contributes significantly in setting educational standards that are relevant to society's needs and current developments. However, challenges remain in policy implementation at the school and district level, which is often hampered by limited resources and support. Therefore, a more integrative and collaborative strategy is needed to ensure that educational standards can be achieved evenly throughout the region.

Keywords: *The Role of the Education Council, Improving Education Standards*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Majelis Pendidikan dalam Peningkatan Standar Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran majelis Pendidikan menghadapi tantangan utama dalam Pendidikan. Tantangan Pendidikan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata, sering kali dihadapkan pada masalah kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, keterbatasan sumber daya, serta pengawasan yang kurang efektif. Majelis pendidikan memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil pendidikan untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai literatur terkait peran majelis pendidikan dalam peningkatan standar pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis Pendidikan berkontribusi signifikan dalam menetapkan

standar pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan di tingkat sekolah dan daerah, yang sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih integratif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa standar pendidikan dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah.

Kata Kunci: Peran Majelis Pendidikan, Peningkatan Standar Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Standar pendidikan yang tinggi merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Di berbagai negara, standar pendidikan sering kali ditetapkan oleh lembaga atau badan khusus yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks ini, majelis pendidikan berfungsi sebagai garda depan dalam mengawal dan meningkatkan kualitas pendidikan¹.

Majelis pendidikan berperan sebagai penghubung antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas menetapkan kebijakan dan standar, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, majelis pendidikan harus mampu memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap elemen dalam sistem Pendidikan². Peran mereka menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana tuntutan terhadap kompetensi sumber daya manusia semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, majelis pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan utama dari peran majelis pendidikan dalam peningkatan standar pendidikan adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan *output* yang berkualitas. Majelis pendidikan bertujuan untuk menetapkan standar yang dapat digunakan sebagai acuan bagi semua institusi pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, majelis pendidikan juga berusaha untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat, sehingga dapat menciptakan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan di masa depan³.

¹ Tince Ajeng Yurika et al., "Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 173-94,

² Burhan Nudin, "Konsep Pendidikan Islam Pada Remaja Di Era Disrupsi Dalam Mengatasi Krisis Moral," *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 11, no. 1 (2020): 63,

³ Iin Meriza, "Pengawasan Controlling Dalam Institusi Pendidikan," *At-Ta ' dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2018): 37-46.

B. Landasan Teori

1. Teori Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan semacam ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan kemampuan afektif dan psikomotorik siswa. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pendidikan berkualitas harus mampu mempersiapkan generasi muda untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat di berbagai sektor, termasuk teknologi, ekonomi, dan sosial budaya⁴.

Selain itu, pendidikan berkualitas ditandai dengan adanya kurikulum yang relevan dan kontekstual, yang disusun berdasarkan kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat. Kurikulum ini harus bersifat dinamis, fleksibel, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi⁵. Kurikulum yang baik juga harus mengintegrasikan aspek pembelajaran berbasis proyek, penelitian, dan aplikasi praktis, sehingga siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkannya dalam situasi nyata.

Pendidikan yang berkualitas juga harus memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap sumber daya pendidikan, seperti buku, teknologi, dan guru yang kompeten. Pendidikan berkualitas harus inklusif, menghargai keragaman, dan mendukung partisipasi aktif semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

2. Peran Majelis Pendidikan

Majelis pendidikan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang dirumuskan mampu menjawab tantangan yang ada, serta sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional. Majelis pendidikan juga berfungsi sebagai pengawas utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat nasional hingga lokal.

Dalam menjalankan tugasnya, majelis pendidikan tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga mengawal proses pelaksanaannya. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kualitas kurikulum, kompetensi guru, dan infrastruktur pendidikan yang tersedia di sekolah-sekolah. Majelis pendidikan juga berperan

⁴ I Made Ngurah Suragangga, "Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas," *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 2 (2017): 154, <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.195>.

⁵ Lestari Wahyudi, "Mengukur Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *Ma'arif Jurnal of Education Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 1, no. 1 (2022): 18-22, <https://jurnal.maarifnumalang.id/> (diunduh 10 Februari 2022).

dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan⁶.

Selain itu, majelis pendidikan berperan sebagai penjamin kualitas pendidikan. Mereka melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak hanya berdasarkan data statistik semata.

3. Standar Pendidikan

Standar pendidikan adalah seperangkat kriteria yang digunakan untuk menilai dan memastikan kualitas pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, serta hasil belajar siswa⁷. Dengan adanya standar pendidikan yang jelas, diharapkan semua institusi pendidikan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.

Kurikulum yang ditetapkan dalam standar pendidikan harus mencerminkan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum ini harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa, termasuk pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, kurikulum juga harus bersifat inklusif, memberikan ruang bagi siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan untuk belajar dan berkembang.

Standar pendidikan juga menekankan pentingnya kompetensi tenaga pendidik. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini termasuk kemampuan dalam mengelola kelas, menguasai materi pelajaran, serta mengadopsi metode pengajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi bagian penting dari standar pendidikan, di mana sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses terhadap teknologi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi peran majelis pendidikan dalam peningkatan standar pendidikan.

⁶ Budi Sunariyanto, "Peranan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo Dalam Peningkatan Standar Pendidikan," *Journal J-MPI* 1, no. 1 (2021): 36-43.

⁷ Noven Kusainun, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 1-7.

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab majelis pendidikan, serta standar pendidikan yang berlaku.

Dalam tahap awal penelitian, peneliti melakukan identifikasi dan pemilihan sumber literatur yang berkualitas dan kredibel. Proses ini melibatkan pencarian di *database* akademik dan perpustakaan, serta seleksi materi yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang dipilih kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang berkaitan dengan peran majelis pendidikan dalam menetapkan dan menerapkan standar pendidikan. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan mendalam.

Selanjutnya, hasil analisis literatur digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana majelis pendidikan berkontribusi dalam peningkatan standar pendidikan. Temuan dari penelitian kepustakaan ini diorganisasi dan disajikan dalam bentuk yang terstruktur, dengan menekankan aspek-aspek penting seperti kebijakan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Metode ini memberikan gambaran yang jelas dan mendetail mengenai peran majelis pendidikan dan membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

D. Hasil Penelitian

1. Kontribusi Majelis Pendidikan dalam Penetapan Standar Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sistem pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya terus-menerus dalam memonitor dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan⁸.

Salah satu alat yang efektif dalam mengukur dan memahami kualitas sistem Pendidikan adalah melalui pengembangan indeks mutu berdasarkan standar nasional. Indeks mutu pendidikan menyediakan ukuran yang komprehensif dan terukur terhadap berbagai aspek kualitas pendidikan, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas, pengelolaan, hingga hasil pembelajaran siswa. Dengan demikian, indeks mutu pendidikan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana sistem pendidikan telah mencapai standar yang telah ditetapkan⁹.

Dalam PP 19/2005, dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁰. Standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

⁸ Heryanti ai denti, "Standar Penilaian Pendidikan Permendikbudristek," *Gurus Umedang Com* 1, no. 106 (2022): 4-10.

⁹ Akhmad Syafii et al., "Pengukuran Indeks Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1697-1701, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332>.

¹⁰ Wahyudi, "Mengukur Kualitas Pendidikan Di Indonesia."

Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan meliputi delapan standar yaitu, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga ke- pendidikan, standar sarana dan, prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian ¹¹.

Majelis pendidikan memiliki peran penting dalam merumuskan dan menetapkan standar pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh sistem pendidikan memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam hal kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan analisis literatur, ditemukan bahwa majelis pendidikan telah berhasil menetapkan standar yang komprehensif, mencakup berbagai aspek penting seperti hasil belajar siswa dan kualitas pengajaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kualitas yang konsisten di seluruh institusi pendidikan¹².

Majelis pendidikan memegang peranan vital dalam merumuskan dan menetapkan standar pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh sistem pendidikan, baik dari segi kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan setiap institusi pendidikan memiliki acuan yang sama dalam menjalankan proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat dijaga dan ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah¹³.

Dalam menjalankan perannya, majelis pendidikan tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga memastikan bahwa standar tersebut komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan. Berdasarkan analisis literatur, majelis pendidikan telah berhasil menetapkan standar yang mencakup kurikulum yang relevan, kompetensi tenaga pendidik yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, standar tersebut juga mencakup penilaian terhadap hasil belajar siswa dan kualitas pengajaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien¹⁴.

Tujuan utama dari penetapan standar ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan kualitas yang konsisten di seluruh institusi pendidikan. Dengan adanya standar yang seragam, tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga mengurangi kesenjangan kualitas antara institusi pendidikan di berbagai daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang lokasi atau latar belakang sosial-ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, peran majelis pendidikan dalam menetapkan dan mengawasi

¹¹ Lusi Wijaya, "Peran Guru Profesional Untuk Meningkatkan Standar Kompetensi Pendidikan," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1222–30, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.273>.

¹² S Bahri and C I Hayati, "Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengwujudkan Mutu Pendidikan Islam Di Kota Lhokseumawe," *Edukasi Islami: Jurnal ...*, 2023, 1883–98, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4423>.

¹³ Bahri and Hayati.

¹⁴ Kusainun, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia."

pelaksanaan standar pendidikan menjadi kunci dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara nasional¹⁵.

2. Mutu Pendidikan

Upaya peningkatan mutu Pendidikan menjadi prioritas utama dalam program pendidikan nasional. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas berat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat¹⁶.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Bab II pasal 2 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan (2005:4) menguraikan bahwa, (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi kelulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan¹⁷.

Dengan adanya delapan Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah atau lembaga pendidikan wajib memenuhi atau setidaknya mengelola pendidikan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Pencapaian mutu pendidikan yang tinggi tidak hanya bergantung pada kualitas guru, tetapi juga melibatkan peran tenaga pendidikan lainnya, seperti pengawas sekolah. Kontribusi pengawas dalam proses pendidikan sering kali kurang disadari, padahal peran mereka sangat signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan¹⁸.

Mutu pengawasan memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas guru. Pengawas yang berkualitas adalah mereka yang mampu memberikan bimbingan dan bantuan yang efektif kepada guru, sehingga meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Ketika pengawasan dilakukan dengan baik, guru dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar dan membimbing siswa. Dengan demikian, kualitas guru yang meningkat akan tercermin dalam proses pembelajaran yang lebih bermutu, di mana siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih baik dan mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan¹⁹.

¹⁵ Yesi Arikarani, "Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan Alternatif Dalam Merevitalisasi Pengetahuan Agama," *El-Ghiroh* 19, no. 5 (2016): 1-23.

¹⁶ Dedi Iskandar, "Peran Pengawas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Smp Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 9, no. 2 (2017): 179, <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v9i2.12918>.

¹⁷ Sabar Budi Raharjo, "Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 20, no. 4 (2014): 470-82, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.160>.

¹⁸ Qiqi Asrama, "Implementasi Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional Di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung)," *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 119-25, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/9395>.

¹⁹ Raharjo, "Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar."

Proses pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan siswa yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ketika semua komponen pendidikan—dari pengawas, guru, hingga proses pembelajaran—bekerja secara sinergis, mutu pendidikan secara keseluruhan akan meningkat. Sinergi ini adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, di mana setiap elemen dalam sistem pendidikan saling mendukung dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan pencapaian standar pendidikan yang lebih tinggi²⁰.

3. Evaluasi dan Pengawasan oleh Majelis Pendidikan

Evaluasi dan pengawasan merupakan dua aspek krusial dalam memastikan keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh majelis pendidikan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah diterapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama implementasi. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh majelis pendidikan seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari kesesuaian kurikulum, efektivitas metode pengajaran, hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai²¹. Pengawasan yang ketat dan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan benar-benar diterapkan di semua tingkatan pendidikan, dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun majelis pendidikan telah melakukan evaluasi secara berkala, proses ini sering kali terbatas pada aspek administratif. Misalnya, laporan-laporan yang dihasilkan sering hanya berfokus pada data kuantitatif seperti jumlah siswa yang lulus ujian, tingkat kehadiran guru, atau jumlah pelatihan yang diadakan²². Sementara aspek kualitatif yang lebih mendalam, seperti keterlibatan siswa, kualitas pembelajaran, atau kepuasan orang tua dan guru, sering diabaikan. Hal ini mengakibatkan evaluasi yang dilakukan kurang mencerminkan kondisi di lapangan dan mengurangi efektivitas pengawasan.

Masalah utama yang diidentifikasi ketika proses evaluasi kurangnya mekanisme yang terintegrasi dan komprehensif. Evaluasi yang efektif seharusnya dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap proses pendidikan. Namun, dalam penerapannya, umpan balik dari pihak-pihak tersebut sering kali tidak diikutsertakan secara sistematis. Hal ini menimbulkan hasil evaluasi yang dilaporkan dengan realitas yang dialami oleh para pelaksana kebijakan di tingkat sekolah.

Selain itu, keterbatasan data yang tidak akurat juga menjadi tantangan dalam proses pengawasan. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui secara berkala

²⁰ Halimatu Sakdiah and Syahrani, "Pengembangan Standar Isi Dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah," *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 622-32.

²¹ Luki Eko Cahyono, Satrijo Budi Wibowo, and Juli Murwani, "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun," *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 161, <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.684>.

²² Sakdiah and Syahrani, "Pengembangan Standar Isi Dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah."

dapat mengaruhi pada penilaian yang tidak akurat terhadap pelaksanaan kebijakan. Misalnya, data tentang kualitas infrastruktur sekolah di daerah terpencil mungkin tidak sepenuhnya tercatat, sehingga majelis pendidikan tidak mendapatkan gambaran yang benar ketika di lapangan²³. Meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan perbaikan dalam pengumpulan dan analisis data, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan secara *real-time*.

Mengatasi kelemahan ini dilakukan dengan cara pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan oleh semua aspek pendidikan, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif²⁴. Pendekatan ini memungkinkan majelis pendidikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengumpulan dan analisis data akan sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdasarkan evaluasi tersebut benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah.

4. Tantangan dalam Penerapan Standar Pendidikan

Penerapan standar pendidikan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Tantangan ini mencakup masalah keuangan dan material yang membatasi kemampuan sekolah-sekolah dalam mencapai standar yang telah ditetapkan²⁵. Banyak institusi pendidikan, terutama di daerah terpencil, menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendukung. Kondisi ini memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah yang memiliki sumber daya lebih baik dengan yang kurang memadai, sehingga menghambat pencapaian standar pendidikan yang merata.

Selain keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting dalam penerapan standar pendidikan. Penolakan terhadap inovasi kurikulum dan metode pengajaran baru sering kali muncul dari berbagai kalangan, termasuk tenaga pendidik yang merasa nyaman dengan praktik lama²⁶. Resistensi ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap manfaat perubahan atau kekhawatiran akan kemampuan beradaptasi dengan sistem baru. Tanpa dukungan penuh dari pihak-pihak terkait, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perubahan standar sering kali terhambat, mengakibatkan penerapan yang tidak optimal.

Ketidakmerataan akses ke fasilitas pendidikan juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan standar pendidikan. Perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas sarana dan prasarana pendidikan menciptakan

²³ Kusainun, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia."

²⁴ I Ridwan and I Ulwiyah, "Sejarah Dan Kontribusi Majelis Ta' Lim Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* 6, no. 1 (2020): 17-42, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/8299>.

²⁵ Ngurah Suragangga, "Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas."

²⁶ Asrama, "Implementasi Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional Di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung)."

ketimpangan yang signifikan. Siswa di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, materi ajar, dan guru yang berkualitas, sementara siswa di pedesaan sering kali harus menghadapi keterbatasan tersebut²⁷. Ketidakmerataan ini menyebabkan adanya disparitas dalam pencapaian standar pendidikan, di mana siswa dari daerah kurang berkembang sulit mencapai standar yang sama dengan siswa dari daerah yang lebih maju.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah harus meningkatkan dukungan finansial dan material kepada sekolah-sekolah yang kurang berkembang, sementara masyarakat dan lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang baru²⁸. Selain itu, perlu adanya program pelatihan dan sosialisasi yang intensif untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, serta kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan semua siswa memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penerapan standar pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang geografis atau sosial mereka²⁹.

5. Peningkatan Standar Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan standar ini bertujuan untuk mendorong para pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, diharapkan setiap institusi pendidikan dapat berfungsi secara optimal dalam mencetak lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, standar ini juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan aspek penting yang menjadi tolok ukur kualitas pendidikan. Aspek-aspek tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Masing-masing aspek ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Misalnya, standar kompetensi lulusan menentukan capaian pembelajaran yang harus diraih oleh siswa, sementara standar isi mengatur tentang materi pembelajaran yang harus disampaikan. Kombinasi dari semua standar ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada satu sisi saja, tetapi mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk membentuk individu yang berkualitas.

²⁷ Cahyono, Wibowo, and Murwani, "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun."

²⁸ Sakdiah and Syahrani, "Pengembangan Standar Isi Dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah."

²⁹ Bahri and Hayati, "Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengwujudkan Mutu Pendidikan Islam Di Kota Lhokseumawe."

Dalam melaksanakan berbagai bidang pekerjaan, termasuk di sektor pendidikan, perencanaan dan pengontrolan merupakan dua komponen penting yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah tahap awal dari sebuah proses yang melibatkan aktivitas melihat ke depan, memikirkan dan merencanakan jauh sebelumnya, serta menggambarkan secara jelas langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang baik memungkinkan lembaga pendidikan untuk menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan merancang strategi yang tepat untuk mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan. Tanpa perencanaan yang matang, upaya peningkatan mutu pendidikan bisa menjadi kurang efektif dan tidak terarah.

Pengontrolan, di sisi lain, merupakan tindakan yang dilakukan pada tahap akhir dari proses tersebut, bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengontrolan juga melibatkan evaluasi berkelanjutan dan penerapan koreksi jika ditemukan penyimpangan dari rencana awal. Dalam konteks pendidikan, kontrol yang efektif sangat penting untuk menjaga kualitas proses belajar mengajar, memantau kinerja pendidik, dan memastikan bahwa standar pendidikan dipatuhi di setiap tingkatan. Tanpa adanya kontrol yang efektif, bahkan rencana terbaik sekalipun dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perencanaan yang matang harus selalu disertai dengan manajemen kontrol yang ketat untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pengawasan (*controlling*), pengarahan (*directing*), dan pembinaan (*commanding*) perlu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan hal-hal berikut:

Mengkoordinasikan semua program yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan³⁰.

1. Memperkaya pengalaman pimpinan lembaga pendidikan.
2. Memperlengkapi kepemimpinan lembaga pendidikan.
3. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam kependidikan.
4. Memberi fasilitas kepada pelaksana program kerja.
5. Memberikan penilaian yang terus-menerus terhadap kinerja pelaksana program pendidikan.
6. Memberikan pengetahuan/skill pada setiap pelaksanaan program pendidikan.
7. Membantu meningkatkan kemampuan kerja para pelaksana program pendidikan, baik guru, pimpinan jabatan struktural, staf administrasi dan personil terkait lainnya

Persiapan-persiapan tersebut di atas dimaksudkan agar pengawasan tidak semata-mata melihat pada hasil kerja, akan tetapi hasil yang maksimal diperoleh tidak terlepas dari bekal yang ada.

6. Prestasi Akademik

Kegiatan belajar mengajar dan prestasi akademik merupakan cerminan dari upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Prestasi akademik yang dicapai oleh siswa tidak hanya bergantung pada faktor individual, tetapi juga melibatkan berbagai komponen penting seperti kualitas

³⁰ Iin Meriza, "Pengawasan Controlling Dalam Institusi Pendidikan."

guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Prestasi akademik ini merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh guru sebagai umpan balik dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan³¹.

Penilaian dalam proses dan hasil belajar bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau perangkat perencanaan pembelajaran lainnya. Penilaian ini bertujuan untuk:

1. Merangsang aktivitas belajar siswa.
2. Menemukan penyebab kemajuan atau kegagalan siswa, guru, maupun proses pembelajaran itu sendiri.
3. Memberikan bimbingan yang sesuai kepada setiap siswa.
4. Memberikan laporan tentang kemajuan atau perkembangan siswa kepada orang tua dan lembaga pendidikan terkait.
5. Sebagai umpan balik untuk program atau kurikulum pendidikan yang sedang berlangsung³².

Mengacu pada pentingnya tujuan-tujuan tersebut, seorang guru diharapkan untuk terus melakukan penilaian dengan berbagai model yang variatif, agar siswa merasakan manfaat dan makna dari setiap penilaian yang dilakukan. Penilaian yang komprehensif terhadap tiga aspek utama dalam diri siswa akan memungkinkan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa serta tingkat efisiensi mengajar guru. Dengan demikian, rancangan pembelajaran untuk proses belajar mengajar berikutnya dapat disempurnakan dengan memperhatikan kekurangan yang terjadi³³.

Penilaian dianggap efektif jika memiliki prosedur yang baku dalam implementasinya. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi, penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi, di mana penilaian tersebut diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penilaian memiliki ukuran keberhasilan atau efektivitas yang dikenal dengan istilah kriteria, yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan proses penilaian tersebut.

E. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran majelis pendidikan sangat penting dalam menetapkan, mengawasi, dan mengevaluasi standar pendidikan. Majelis pendidikan berfungsi sebagai pengarah utama dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun, penerapan standar pendidikan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan ketidakmerataan akses ke fasilitas pendidikan. Keterbatasan ini menghambat kemampuan sekolah-sekolah di berbagai daerah

³¹ Lailatul Azizah and Silvia Witri, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Total Quality Management Dalam Program Akreditasi Sekolah," *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD* 1, no. 1 (2021): 69-78, <https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.263>.

³² Wijaya, "Peran Guru Profesional Untuk Meningkatkan Standar Kompetensi Pendidikan."

³³ Heryanti ai denti, "Standar Penilaian Pendidikan Permendikbudristek."

untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, sementara resistensi terhadap perubahan memperlambat adaptasi terhadap inovasi dalam kurikulum dan metode pengajaran.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, yang melibatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dukungan finansial dan material, penguatan kapasitas sekolah dan tenaga pendidik, serta kebijakan yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa standar pendidikan dapat diterapkan secara efektif dan merata di seluruh wilayah. Dengan strategi yang tepat, diharapkan peningkatan standar pendidikan dapat tercapai, sehingga semua siswa, tanpa memandang latar belakang geografis atau sosial, memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikarani, Yesi. "Peran Majelis Taklim Sebagai Pendidikan Alternatif Dalam Merevitalisasi Pengetahuan Agama." *El-Ghiroh* 19, no. 5 (2016): 1–23.
- Asrama, Qiqi. "Implementasi Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional Di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung)." *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 119–25. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/9395>.
- Azizah, Lailatul, and Silvia Witri. "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Total Quality Management Dalam Program Akreditasi Sekolah." *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD* 1, no. 1 (2021): 69–78. <https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.263>.
- Bahri, S, and C I Hayati. "Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengwujudkan Mutu Pendidikan Islam Di Kota Lhokseumawe." *Edukasi Islami: Jurnal ...*, 2023, 1883–98. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4423>.
- Cahyono, Luki Eko, Satrijo Budi Wibowo, and Juli Murwani. "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 161. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.684>.
- Heryanti ai denti. "Standar Penilaian Pendidikan Permendikbudristek." *Gurus Umedang Com* 1, no. 106 (2022): 4–10.
- lin Meriza. "Pengawasan Controlling Dalam Institusi Pendidikan." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2018): 37–46.
- Iskandar, Dedi. "Peran Pengawas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Smp Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 9, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v9i2.12918>.
- Kusainun, Noven. "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia." *JUrnal Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 1–7.
- Ngurah Suragangga, I Made. "Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 2 (2017): 154. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.195>.
- Nudin, Burhan. "Konsep Pendidikan Islam Pada Remaja Di Era Disrupsi Dalam Mengatasi Krisis Moral." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 11, no. 1 (2020): 63.

- [https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11\(1\).63-74](https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11(1).63-74).
- Raharjo, Sabar Budi. "Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 20, no. 4 (2014): 470–82. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.160>.
- Ridwan, I, and I Ulwiyah. "Sejarah Dan Kontribusi Majelis Ta'Lim Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* 6, no. 1 (2020): 17–42. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/8299>.
- Sakdiah, Halimatu, and Syahrani. "Pengembangan Standar Isi Dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah." *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 622–32.
- Sunariyanto, Budi. "Peranan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo Dalam Peningkatan Standar Pendidikan." *Journal J-MPI* 1, no. 1 (2021): 36–43.
- Syafii, Akhmad, Bahar Bahar, Shobichah Shobichah, and Azka Muharam. "Pengukuran Indeks Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1697–1701. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332>.
- Wahyudi, R., Nurdin., dan Saifuddin. "Analisa Pengaruh Jenis Elektroda Pada Pengelasan SMAW Penyambungan Baja Karbon Rendah Dengan Baja Karbon Sedang Terhadap TYensile Strenght." *Journal of Welding Technology* 1, no. 2 (2019): 43–47.
- Wahyudi, Lestari. "Mengukur Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Ma'arif Jurnal of Education Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 1, no. 1 (2022): 18–22. <https://jurnal.maarifnumalang.id/> (diunduh 10 Februari 2022).
- Wijaya, Lusi. "Peran Guru Profesional Untuk Meningkatkan Standar Kompetensi Pendidikan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1222–30. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.273>.
- Yurika, Tince Ajeng, Iis Sugianti, Irwan Fathurrochman, and Lukman Asha. "Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 173–94.